



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROSDIANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 209980

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/228 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.300.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CITY CAR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 94.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 25.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	6.768.300.000
III. HUTANG	Rp.	350.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.418.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.